



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Wakil Kepala Sekolah

1. Pengertian Peran

Peran merupakan suatu konsep yang menggambarkan tanggung jawab dan ekspektasi yang harus dipenuhi oleh seseorang berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam sebuah organisasi. Menurut KBBI (2016), peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dari seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks sekolah, peran ini menjadi acuan bagi Wakil Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Lebih jauh, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan yang mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara optimal.²² Dengan demikian, Wakil Kepala Sekolah tidak hanya sekadar memiliki jabatan formal, tetapi juga harus aktif menjalankan hak dan kewajibannya untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah.

Adapun menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian ekspektasi yang dikenakan pada individu yang menempati posisi sosial tertentu. Selanjutnya Bruce J. Biddle mendefinisikan arti peran adalah seperangkat fungsi yang diberikan kepada individu dalam suatu sistem sosial.²³

²² (dalam Abraham, 2021)

²³ (Sarlito, Sarwono, 2015)



Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa "peran" merujuk pada serangkaian perilaku, tugas, dan tanggung jawab yang diharapkan dari individu berdasarkan posisinya dalam struktur sosial atau organisasi. Dalam konteks manajemen pendidikan, "peran" merujuk pada serangkaian tugas, tanggung jawab, dan ekspektasi yang melekat pada posisi tertentu dalam organisasi Pendidikan.²⁴ Peran ini mencerminkan fungsi spesifik yang harus dijalankan oleh individu untuk mencapai tujuan institusi pendidikan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, Wakil Kepala Sekolah memiliki peran penting dalam mengelola berbagai aspek operasional sekolah, termasuk administrasi, kurikulum, dan sumber daya manusia, guna mendukung proses pembelajaran yang optimal.

2. Pengertian Wakil Kepala Sekolah

Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) adalah seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk membantu Kepala Sekolah dalam mengelola berbagai bidang di sekolah.²⁵ Wakasek bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja sekolah.²⁶

Secara umum, Wakil Kepala Sekolah bertugas membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan

²⁴ Mardiyah Arini Zahwatul Khoiroh, Iffah Okta Afiana, "Analisis Jabatan Sebagai Optimalisasi Penempatan Sumber Daya Manusia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 8, no. 12 (2024): 59–70.

²⁵ Arry Verdian and Agus Wantoro, "Komparasi Metode Profile Matching Dengan Fuzzy Profile Matching Pada Pemilihan Wakil Kepala Sekolah," *Jurnal Ilmiah Media Sisfo* 13, no. 2 (2019): 97–105.

²⁶ Ujang Yosep Ayubi, Much. Tsulutsallaily Syahmuntaqy, and Ari Prayoga, "Implementasi Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Pendidik," *Manazhim* 2, no. 2 (2020): 118–130.



sekolah. Tugas pokok Wakil Kepala Sekolah bervariasi tergantung pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, hubungan masyarakat, dan lain-lain.

Wakil Kepala Sekolah merupakan pejabat struktural dalam organisasi sekolah yang memiliki tugas strategis untuk membantu Kepala Sekolah dalam mengelola berbagai aspek, termasuk di antaranya bidang sarana dan prasarana. Menurut Paudi dan Suking, fungsi Wakil Kepala Sekolah adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran.²⁷

Waka memiliki tugas-tugas untuk membantu kepala sekolah dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3. Peran Wakil Kepala Sekolah

Dalam struktur organisasi sekolah, Wakil Kepala Sekolah memiliki peran strategis dalam mendukung kepala sekolah untuk menjalankan fungsi manajerial dan operasional pendidikan. Menurut teori manajemen pendidikan, peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan fungsi-fungsi inti dalam organisasi pendidikan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan (POAC). Fungsi-fungsi tersebut penting dalam mencapai tujuan

²⁷ Sulistia Paudi, Ikhfan, and Arifin Suking, “Kinerja Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Dilihat Dari Tugas Pokok Dan Fungsinya,” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (2020): 192–205.



institusional sekolah secara efektif dan efisien.²⁸

Secara umum, peran Wakil Kepala Sekolah dapat diklasifikasikan ke dalam enam kategori utama yang dirumuskan berdasarkan pendekatan konseptual dalam manajemen pendidikan serta hasil kajian praktik kelembagaan, sebagai berikut:

a. Peran sebagai Perencana

Perencanaan merupakan fondasi utama dalam manajemen pendidikan dan menempati posisi strategis sebagai langkah pertama dari kerangka POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). *Phase planning* melibatkan penetapan tujuan, pemilihan strategi, dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.²⁹ Dalam konteks sekolah, “peran sebagai perencana” menempatkan Wakil Kepala Sekolah dalam posisi sentral untuk menginisiasi, merumuskan, dan menetapkan agenda operasional dan strategis yang mendukung proses pendidikan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, Sagala dalam penelitian Mahbub menekankan bahwa perencanaan pendidikan harus berangkat dari analisis kebutuhan yang akurat dan berbasis data.³⁰ Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa Wakil Kepala Sekolah bertanggung

²⁸ Muh. Shulthon Rachmandhani and Edi Irawan, “Karakteristik Tugas Manajemen Puncak Dalam Pendidikan Islam,” *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management* 2, no. 2 (2021): 191–204.

²⁹ Afiful Ikhwan, “MANAJEMEN PERENCANAAN PENDIDIKAN ISLAM,” *Edukasi* 16, no. 2 (2015): 39–55.

³⁰ Mahbub, “Analisis Peran Strategis Wakil Kepala Sekolah Dalam Perencanaan Pendidikan,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam* 2, no. 5 (2021): 123–130.



jawab dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), kurikulum tahunan, hingga kalender akademik. Sebagaimana ungkapan Basirun, Ajepri, dan Anwar dalam penelitian Ningsih dkk, proses perencanaan harus melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan, seperti Kepala Sekolah, Wakasek, guru, dan komite sekolah.³¹

Dengan demikian, peran perencana yang dijalankan Wakil Kepala Sekolah mencakup penyusunan visi strategis, analisis kebutuhan berbasis data, penyusunan anggaran, serta pemilihan prosedur pengadaan yang transparan dan kolaboratif. Peran ini bukan hanya administratif, melainkan juga visioner, karena menjadi titik awal bagi seluruh siklus manajerial sekolah.

b. Peran sebagai Pengorganisasian

Dalam konteks manajemen pendidikan, pengorganisasian merupakan fungsi kedua setelah perencanaan yang menekankan pada penataan sumber daya manusia dan non-manusia secara sistematis agar tujuan institusi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Wakil Kepala Sekolah, sebagai bagian dari tim manajerial sekolah, memiliki peran penting sebagai pengorganisasasi. Peran ini diwujudkan dalam tindakan mengatur, mendistribusikan, dan menyelaraskan tugas-tugas antarwarga sekolah sesuai dengan struktur organisasi, potensi, dan kapasitas yang dimiliki.

³¹ Auliya Cahya Ningsih et al., “Studi Literatur : Perencanaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 14, no. April (2024): 209–216.



Menurut Nur Khikmah, pengorganisasian adalah suatu proses menentukan, mengelompokkan, dan mengatur berbagai aktivitas serta menetapkan wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.³² Dalam konteks pendidikan, pengorganisasian dilakukan untuk membentuk iklim kerja yang sehat dan fungsional, sehingga seluruh komponen sekolah dapat bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini mencakup penyusunan jadwal pelajaran, pembagian tugas tambahan, rotasi tugas harian, dan penempatan guru atau staf sesuai kompetensi profesionalnya.

Wakil Kepala Sekolah memiliki kewenangan untuk menyeimbangkan beban kerja guru dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan asas keadilan, profesionalisme, dan kebutuhan operasional sekolah. Ia juga memainkan peran sebagai jembatan komunikasi antara Kepala Sekolah dan guru/staf dalam rangka menyampaikan kebijakan, merespons masukan, serta memfasilitasi dinamika internal sekolah agar tetap selaras dengan visi-misi lembaga.

Peran ini sejalan dengan pandangan Robbins dan Coulter, yang menyatakan bahwa pengorganisasian dalam organisasi pendidikan bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan sumber daya organisasi melalui struktur yang jelas, agar fungsi-fungsi operasional dapat berjalan secara optimal.³³ Di sekolah, hal ini juga mencakup

³² Nur Khikmah, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan,” *JAMP : Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 3 (2020): 123–130.

³³ Stephen P Robbins and Mary Coulter, *MANAGEMENT* (London: Pearson Education, 2016).

pengelolaan ruang kelas, jadwal pemakaian laboratorium, serta penugasan guru piket atau wali kelas.

Secara empiris, hasil penelitian Darmawan menunjukkan bahwa keberhasilan pengorganisasian yang dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah sangat berpengaruh terhadap terciptanya budaya kerja kolaboratif dan efektif. Ketika pembagian tugas dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan keahlian masing-masing, maka akan tercipta rasa tanggung jawab dan kepuasan kerja yang berdampak positif terhadap proses pembelajaran.³⁴

c. Peran sebagai Pengarah

Wakil Kepala Sekolah memiliki tanggung jawab strategis dalam mengarahkan dan membimbing seluruh elemen sekolah untuk bekerja sesuai dengan visi dan misi institusi pendidikan. Peran ini menuntut kemampuan dalam memberikan arahan yang jelas dan membangun motivasi kerja guru dan tenaga kependidikan, agar setiap kegiatan operasional di sekolah dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi.

Dalam konteks ini, Wakil Kepala Sekolah berperan aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan kurikulum, baik dengan memberikan dukungan administratif, membimbing implementasi strategi pembelajaran, maupun melakukan penguatan terhadap nilai-nilai

³⁴ Yohanes Andang Darmawan and Yari Dwikurnaningsih, “Pengembangan Model Manajemen Layanan Informasi Karir Berbasis ICT Bagi Peserta Didik SMA,” *IICET Journal* 9, no. 3 (2015): 241–251.

 karakter dan budaya kerja sekolah. Ia juga berperan dalam menciptakan iklim kerja yang positif, inklusif, dan kolaboratif, sehingga seluruh warga sekolah merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal.

Peran pengarah ini selaras dengan prinsip *Actuating* dalam teori manajemen *POAC* (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), di mana penggerakan sumber daya manusia menjadi unsur kunci untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif.³⁵ Dalam kerangka manajemen pendidikan, peran ini juga mencerminkan kepemimpinan transformatif yang berfokus pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas individu.

Menurut Darmawan, kemampuan Wakil Kepala Sekolah dalam memberikan arahan yang konstruktif dapat meningkatkan semangat kerja guru serta memperkuat sinergi antardepartemen di sekolah.³⁶ Arah yang tepat juga membantu mencegah terjadinya konflik peran dan memastikan setiap komponen organisasi bekerja dalam satu garis koordinasi yang utuh.

Dengan demikian, Wakil Kepala Sekolah sebagai pengarah tidak hanya bertugas memberi instruksi teknis, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan dan inspirator bagi seluruh elemen sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan secara utuh dan bermakna.

³⁵ Robbins and Coulter, *MANAGEMENT*.

³⁶ Darmawan and Dwikurnaningsih, “Pengembangan Model Manajemen Layanan Informasi Karir Berbasis ICT Bagi Peserta Didik SMA.”



d. Peran sebagai Pengkoordinasi

Wakil Kepala Sekolah berperan dalam menjalin koordinasi antarunit di lingkungan sekolah. Ia menghubungkan berbagai divisi seperti guru, staf administrasi, kesiswaan, sarana-prasarana, dan lainnya agar bekerja secara sinergis. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif dan penyamaan persepsi menjadi kunci utama.

Tugas koordinasi mencakup pengaturan jadwal kegiatan bersama, pelaksanaan program lintas bidang, serta penyelesaian masalah yang melibatkan banyak pihak. Dengan menjalankan fungsi ini secara konsisten, Wakil Kepala Sekolah membantu menciptakan lingkungan kerja yang terorganisasi dan efisien.

Peran ini sejalan dengan prinsip Organizing dalam teori POAC yang menekankan pentingnya koordinasi struktur dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Koordinasi antardepartemen adalah fondasi bagi terciptanya manajemen sekolah yang harmonis dan adaptif.³⁷

e. Peran sebagai Pengawas

Pengawasan merupakan bagian integral dari tugas Wakil Kepala Sekolah. Ia bertanggung jawab dalam memastikan bahwa program yang dirancang terlaksana sesuai rencana dan standar mutu pendidikan. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan tugas guru dan staf, pemanfaatan sarana-prasarana, serta ketercapaian tujuan pembelajaran.

³⁷ Siti Lutfiachi, “Strategi Implementasi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan,” *Moral : Jurnal kajian Pendidikan Islam* (2024).



Wakil Kepala Sekolah melaksanakan monitoring secara berkala, baik melalui observasi langsung, pelaporan kegiatan, maupun evaluasi dokumen. Temuan dari proses pengawasan digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam teori *Controlling* pada POAC, pengawasan adalah tahapan yang menjamin kesesuaian antara perencanaan dan implementasi. Menurut Robbins dan Coulter, pengawasan efektif harus bersifat korektif dan membangun, bukan hanya mencari kesalahan.³⁸

f. Peran sebagai Evaluator

Sebagai evaluator, Wakil Kepala Sekolah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja sekolah, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan dampak dari program yang telah dijalankan.

Evaluasi yang dilakukan bersifat reflektif dan digunakan sebagai dasar perbaikan serta pengambilan keputusan di masa mendatang. Proses evaluasi ini juga melibatkan partisipasi guru, siswa, dan pemangku kepentingan lain untuk mendapatkan data yang objektif dan komprehensif.

Dalam kerangka manajemen pendidikan, evaluasi bukan hanya alat ukur, tetapi juga bagian dari pembelajaran organisasi.³⁹ Evaluasi yang baik memungkinkan sekolah bertransformasi menjadi lembaga

³⁸ Robbins and Coulter, *MANAGEMENT*.

³⁹ Moh. Fachri, “URGENSI EVALUASI PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN,” *Edureligia* 2, no. 1 (2018).



yang responsif terhadap perubahan dan kebutuhan peserta didik.

g. Peran sebagai Inovator

Wakil Kepala Sekolah dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menjawab tantangan pendidikan abad ke-21. Ia diharapkan mampu mencetuskan ide baru dalam pengembangan strategi pembelajaran, pengelolaan fasilitas, dan penciptaan budaya sekolah yang positif.

Inovasi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi, integrasi pembelajaran berbasis proyek, atau inisiatif menciptakan ruang-ruang belajar yang mendukung karakter dan kreativitas siswa. Dalam melaksanakan peran ini, Waka harus bersikap terbuka terhadap perubahan dan berani mengambil risiko yang terukur.

Peran inovator mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), di mana pemimpin tidak hanya mengelola tetapi juga menjadi agen perubahan. Inovasi pendidikan merupakan pendorong utama kemajuan kualitas layanan belajar dan pembangunan karakter siswa secara utuh.⁴⁰

B. Proses Pembelajaran

1. Pengertian Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan inti dari penyelenggaraan pendidikan. Dalam kerangka pendidikan Islam maupun umum,

⁴⁰ Lailatul Mubarokah, Umaymah Nurul Azizah, and Brylian Nurfan Nugroho, “Pentingnya Inovasi Pendidik Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan,” *Jira: Jurnal Inovasi dan Riset Akademik* 2, no. 9 (2021): 1349–1358.



pembelajaran tidak sekadar memindahkan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, tetapi merupakan proses interaksi dinamis yang melibatkan unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik secara holistik. Pembelajaran menuntut adanya aktivitas sadar yang terstruktur antara guru, peserta didik, serta lingkungan sebagai pendukung berlangsungnya proses belajar mengajar secara efektif.

Dalam konteks pendidikan Islam, proses pembelajaran memiliki dimensi spiritual dan moral yang sangat kuat. Menurut Hoerudin, pembelajaran dalam Islam bukan hanya bertujuan menanamkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan akhlak mulia dan kesadaran keagamaan peserta didik melalui interaksi edukatif yang bermakna.⁴¹ Interaksi ini tidak hanya bersifat satu arah dari guru kepada siswa, tetapi juga timbal balik, penuh empati, dan mengedepankan nilai-nilai keteladanan. Oleh karena itu, relasi antara pendidik dan peserta didik menjadi faktor krusial dalam keberhasilan proses pembelajaran.

Lebih lanjut, pembelajaran yang baik perlu mempertimbangkan konteks psikologis dan sosial peserta didik. Dalam pendekatan konstruktivistik, pembelajaran diarahkan agar siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman, eksplorasi, dan pemaknaan terhadap realitas kehidupan. Oleh karena itu, peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing menjadi sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, inklusif, dan merangsang potensi intelektual

⁴¹ Cecep Wahyu Hoerudin and Yuliani, "LEARNING PROCESS THROUGH INTERACTION EDUCATIVE IN," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. February (2025): 87–96.



serta spiritual peserta didik.

Secara praktis, esensi pembelajaran dapat dilihat dari adanya keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, pencapaian tujuan pendidikan, serta perubahan perilaku yang mencerminkan peningkatan kualitas keilmuan dan karakter. Ketercapaian tujuan pembelajaran sangat bergantung pada desain pembelajaran yang sistematis, penggunaan media yang relevan, serta kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Oleh sebab itu, pembelajaran yang bermutu tidak dapat dilepaskan dari manajemen pendidikan yang terencana dan terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar secara maksimal.

2. Komponen dalam Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

Pertama, guru dan peserta didik merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pendidik yang merancang pengalaman belajar, memberikan bimbingan, serta memfasilitasi diskusi dan interaksi.⁴² Peserta didik adalah subjek aktif yang menerima, mengolah, serta menerapkan pengetahuan melalui pengalaman langsung.⁴³ Keaktifan peserta didik menentukan efektivitas interaksi di kelas.

Kedua, tujuan, materi, dan metode menjadi kerangka logis

⁴² Dwi Indah Lestari and Heri Kurnia, “IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF UNTUK,” *JPG : Jurnal Pendidikan Guru* 4, no. 3 (2023): 4–7.

⁴³ Dika Kurniawan et al., “Analisis Pengalaman Belajar Siswa Melalui Penerapan Pendekatan,” *Jurnal Pengajaran Sekolah Dasar* 3, no. 2024 (2024): 27–35.



pembelajaran. Tujuan memberi arah dan menjadi tolok ukur pencapaian.⁴⁴

Materi adalah konten ilmu yang berakar pada kebutuhan dan karakteristik siswa.⁴⁵ Metode pembelajaran mencakup strategi dan teknik, seperti diskusi, demonstrasi, atau problem-based learning yang dipilih berdasarkan tujuan, materi, dan karakteristik siswa.⁴⁶

Ketiga, media & sumber belajar, serta evaluasi menjadi pendukung dan pengukur keberhasilan. Media, baik cetak, digital, maupun lingkungan meningkatkan minat, interaksi, serta kemudahan pemahaman siswa.⁴⁷ Sementara evaluasi, baik formatif maupun sumatif, digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan memberikan umpan balik guna perbaikan pembelajaran selanjutnya.⁴⁸ Menurut Gagne dalam penelitian Yoga, keberhasilan pembelajaran sangat bergantung pada kejelasan tujuan, metode yang sesuai, media yang mendukung, dan evaluasi yang tepat guna memastikan semua komponen bekerja sinergis.⁴⁹

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Pembelajaran

Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan proses pembelajaran, di antaranya:

a. Faktor Internal

⁴⁴ Zainur Arifin, “Manajemen Peserta Didik Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan Pendahuluan Keberhasilan Manajemen Peserta Didik Itu Tidak Terlepas Dari Adanya Kepala Madrasah Dan Warga Madrasah , Di Mana Tempat Para Peserta Didik Itu Belajar . Kepala Madrasah Merupakan,” *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2022): 71–89.

⁴⁵ Reno Fernandes, “Relevansi Kurikulum 2013 Dengan Kebutuhan Peserta Didik Di Era Revolusi 4.0,” *Jurnal Socius* 6 (2019).

⁴⁶ Lestari and Kurnia, “IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN INOVATIF UNTUK.”

⁴⁷ Lutfiachi, “Strategi Implementasi Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan.”

⁴⁸ Fachri, “URGENSI EVALUASI PEMBELAJARAN DALAM PENDIDIKAN.”

⁴⁹ Yoga Anjas Pratama, “TEORI BELAJAR KOGNITIVISME ROBERT M. GAGNE DALAM PANDANGAN ISLAM,” *Berkala Ilmiah Pendidikan* 4 (2024).



Motivasi, minat, dan kemampuan kognitif peserta didik adalah pendorong utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi dan mengatasi tantangan akademik. Demikian pula, minat terhadap materi pelajaran meningkatkan keterlibatan dan kemauan untuk mendalami. Selain itu, kondisi fisik dan psikologis, seperti kesehatan, tingkat kelelahan, dan suasana emosional juga berperan penting dalam memperlancar proses pengolahan informasi dan penyerapan materi.

b. Faktor Eksternal: Lingkungan dan Sumber Belajar

Lingkungan belajar yang kondusif, meliputi ruang kelas yang nyaman, pencahayaan cukup, ventilasi baik, dan tata ruang yang mendukung interaksi sangat berpengaruh terhadap konsentrasi dan kenyamanan siswa. Menurut Sudjana, kelengkapan alat bantu dan kondisi fisik ruang belajar dapat mendorong efektivitas dan kualitas pengalaman belajar. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti meja, kursi ergonomis, papan tulis, proyektor, dan jaringan internet, juga menjadi elemen kritis yang menunjang berbagai metode pembelajaran yang modern.⁵⁰

C. Sarana dan Prasarana Sekolah

1. Pengertian Sarana dan Prasarana Sekolah

Sarana dan prasarana merupakan dua komponen penting yang mendukung kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran di sekolah.

⁵⁰ Fernandes, “Relevansi Kurikulum 2013 Dengan Kebutuhan Peserta Didik Di Era Revolusi 4.0.”



Menurut Permendikbud No. 24 Tahun 2016, sarana pendidikan adalah alat, benda, atau fasilitas yang digunakan secara langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan prasarana adalah fasilitas fisik yang mendukung terlaksananya kegiatan pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta lingkungan sekolah⁵¹.

Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dan terkelola dengan baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menarik bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan penelitian Sani dan Ilyas yang menyatakan bahwa kualitas sarana dan prasarana berpengaruh langsung terhadap motivasi dan hasil belajar siswa⁵².

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang atas tercapainya suatu tujuan dari pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah merupakan komponen penting yang mendukung proses pembelajaran. Keberadaan fasilitas yang memadai dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman dan efektif. Beberapa alasan pentingnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran adalah ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, dan perpustakaan yang memadai memungkinkan siswa belajar dengan lebih baik. Peralatan teknologi seperti komputer, proyektor, dan internet membantu meningkatkan interaktivitas dan akses informasi dalam pembelajaran.

⁵¹ S Rahayu, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan,” no. 106 (2019).

⁵² Amar Sani and Gunawan Bata Ilyas, “Analisis Kompetensi Guru Dan Sarana Prasarana Terhadap Prestasi Belajar Siswa,” *YUME : Journal of Management* 4, no. 3 (2021): 71–86, <https://journal.stteamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/973>.



Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dapat berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anita dan Elsaday, terdapat hubungan yang signifikan antara kondisi fisik sekolah dan prestasi siswa ⁵³. Sekolah yang memiliki fasilitas yang baik cenderung memiliki siswa dengan prestasi akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah yang fasilitasnya kurang memadai.

Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan fasilitas pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar. Pengelolaan sarana dan prasarana yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan ⁵⁴. Sarana pendidikan meliputi semua perangkat yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan peralatan pendidikan lainnya. Prasarana pendidikan meliputi fasilitas pendukung yang tidak langsung digunakan dalam proses belajar mengajar seperti jalan menuju sekolah, tempat parkir, dan sanitasi. ⁵⁵

Sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa serta kepuasan siswa terhadap lingkungan sekolah. Siswa yang belajar dalam lingkungan yang nyaman dan mendukung cenderung memiliki semangat belajar yang lebih tinggi. Guru dapat mengajar dengan lebih

⁵³ Anita Amelia Ole and Elsaday Geovanka Dipan, “Hubungan Kondisi Lingkungan Belajar Di Sekolah Dan Hasil Belajar Siswa,” *Jurnal Inovasi Pembelajaran Matematika: PowerMathEdu* 2, no. 1 (2023): 71–78.

⁵⁴ Lisa Septia Dewi BR.Ginting, *Pengelolaan Pendidikan Indonesia* (Medan: Guepedia, 2020).

⁵⁵ Asy’ari, “Peran Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.”



efektif jika didukung oleh fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang nyaman, alat peraga, teknologi pembelajaran, dan laboratorium yang lengkap. Hal ini memungkinkan guru untuk menerapkan metode pengajaran yang lebih bervariasi dan menarik. Fasilitas yang baik dapat mengurangi tingkat absensi dan dropout siswa. Lingkungan sekolah yang nyaman dan aman membuat siswa lebih betah dan termotivasi untuk terus bersekolah.

2. Fungsi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Ine Rahayu dan Tedi, fungsi utama sarana dan prasarana adalah sebagai media penunjang pembelajaran, meningkatkan kenyamanan, serta menciptakan suasana yang dapat merangsang semangat belajar peserta didik.⁵⁶

Selain itu, Mahmud dkk menambahkan bahwa sarana dan prasarana berperan sebagai faktor pendukung inovasi pembelajaran.⁵⁷ Misalnya, adanya laboratorium komputer akan memfasilitasi proses belajar berbasis teknologi sehingga siswa dapat menguasai keterampilan abad 21. Tidak hanya itu, ketersediaan ruang kelas yang nyaman, pencahayaan yang memadai, serta perangkat multimedia seperti proyektor dan smartboard turut menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong interaksi aktif antara guru dan siswa.

⁵⁶ Tedi Purnamaningsih, Ine Rahayu ; Purbangkara, *Kualitas Pembelajaran Siswa*, vol. 1 (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2022).

⁵⁷ Amir Mahmud, Hendy Pratama, and Muhammad Ilyas, “Perencanaan, Pengadaan, Inventarisasi, Pemeliharaan, Penghapusan: Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Meningkatkan Kualitas Sekolah Pendidikan Islam,” *Jurnal Al-Hikmah Way Kanan* 4, no. 2 (2023): 96–108.



Dengan demikian, peran Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana menjadi sangat strategis dalam merancang dan mengelola infrastruktur pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan kurikulum modern. Upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara berkelanjutan juga mencerminkan komitmen sekolah dalam menciptakan atmosfer pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh. Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana memegang peran penting dalam menjamin ketersediaan, kualitas, dan kelayakan fasilitas sekolah agar fungsi-fungsi tersebut dapat terealisasi secara maksimal

3. Prinsip-prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana

Manajemen sarana dan prasarana sekolah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang baik untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Menurut Robbins dan Coulter, beberapa prinsip yang relevan antara lain⁵⁸:

- a. Prinsip Perencanaan Matang: Perencanaan yang sistematis tentang pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana agar sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam manajemen sarana dan prasarana. Perencanaan yang matang mencakup analisis kebutuhan, perencanaan anggaran, serta penjadwalan pengadaan dan pemeliharaan aset sekolah. Perencanaan dilakukan

⁵⁸ Robbins and Coulter, *MANAGEMENT*.



secara sistematis berdasarkan data realistik dan kebutuhan aktual sekolah. Hal ini bertujuan agar pengadaan sarana tidak tumpang tindih, tepat guna, serta dapat menunjang tujuan pendidikan secara optimal. Perencanaan yang baik juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam jangka pendek maupun panjang.

- b. Prinsip Pengorganisasian Jelas: Pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas kepada staf atau tim pengelola sarana dan prasarana. Pengelolaan sarana dan prasarana harus melibatkan struktur organisasi yang jelas. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar personel atau tim pengelola dilakukan secara tegas dan terarah. Misalnya, siapa yang bertugas mendata inventaris, siapa yang menangani pemeliharaan, hingga siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pelaporan kerusakan. Dengan pengorganisasian yang baik, koordinasi antar unsur dalam sekolah menjadi lebih efektif dan terhindar dari tumpang tindih peran maupun kelalaian tugas.
- c. Prinsip Pengawasan Ketat: Melakukan kontrol secara berkala untuk memastikan sarana tetap dalam kondisi baik dan digunakan secara optimal.

Pengawasan merupakan kegiatan kontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan sarana agar berjalan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan dilakukan secara berkala dan mencakup aspek kondisi fisik sarana, pemanfaatannya oleh warga sekolah, serta potensi penyalahgunaan atau kerusakan. Pengawasan yang baik menghasilkan

laporan evaluatif yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengambilan kebijakan lebih lanjut. Dalam hal ini, Waka Sarpras berperan strategis dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi terhadap kebutuhan perbaikan atau penggantian.

- d. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas: Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan.

Setiap penggunaan sumber daya dalam pengelolaan sarana dan prasarana harus mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Efisiensi berarti meminimalkan biaya dan tenaga tanpa mengurangi kualitas layanan, sedangkan efektivitas merujuk pada tercapainya tujuan dengan cara yang paling tepat. Misalnya, pemanfaatan ruang kelas multifungsi untuk kegiatan pembelajaran dan non-akademik mencerminkan efisiensi ruang, sementara pemeliharaan rutin sarana mencerminkan efektivitas dalam menjaga umur pakai fasilitas. Kedua prinsip ini saling melengkapi dan menjadi landasan dalam setiap kebijakan pengelolaan sarana sekolah.

- e. Prinsip Keberlanjutan: Memastikan pemeliharaan dan pengembangan sarana dilakukan secara berkelanjutan agar dapat digunakan jangka panjang.

Prinsip keberlanjutan menekankan pentingnya pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara terus-menerus agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Sarana pendidikan tidak cukup hanya diadakan, tetapi harus dijaga kualitas dan fungsinya melalui





pemeliharaan rutin, perbaikan berkala, serta pembaruan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pendidikan.

Dalam konteks ini, keberlanjutan mencakup aspek teknis dan kebijakan, seperti penjadwalan pemeliharaan, penganggaran rutin, dokumentasi kondisi aset, serta perencanaan pengadaan baru jika diperlukan. Pendekatan ini mencegah kerusakan total yang mengakibatkan pemborosan anggaran atau terganggunya proses pembelajaran. Selain itu, keberlanjutan juga mencerminkan tanggung jawab terhadap generasi berikutnya dalam hal penyediaan fasilitas pendidikan yang layak.

Dengan demikian, prinsip keberlanjutan menuntut adanya komitmen jangka panjang dari manajemen sekolah, terutama dari Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana, untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan layanan fasilitas pendidikan dalam menunjang tujuan pembelajaran secara optimal.

4. Pengaruh Manajemen Sarana dan Prasarana terhadap Kinerja Sekolah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basith, manajemen sarana dan prasarana yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja sekolah.⁵⁹ Hal ini disebabkan karena sarana yang memadai dan terawat dapat menunjang aktivitas belajar mengajar secara optimal, serta memberikan kenyamanan bagi guru dan siswa.

⁵⁹ Abdul Basith, “KONTRIBUSI KINERJA KOMITE SEKOLAH TERHADAP PENINGKATAN MUTU SARANA PRASARANA PENDIDIKAN,” *J-MPI* 5, no. 1 (2020): 14–25.



Lebih lanjut, Suvita dkk menemukan bahwa sekolah yang memiliki sistem manajemen sarana dan prasarana yang baik mampu mempertahankan keberlangsungan proses pembelajaran tanpa hambatan teknis dan fisik.⁶⁰ Kondisi ini berdampak positif pada motivasi dan prestasi belajar siswa.

Dengan demikian, peran Wakil Kepala Sekolah sebagai pengelola sarana dan prasarana bukan hanya sebatas administratif, tetapi juga strategis dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan peran Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas kerja, baik dari sisi pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor ini penting dianalisis karena turut menentukan keberhasilan peran Waka Sarpras dalam mendukung proses pembelajaran. Dalam konteks manajemen pendidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Robbins & Judge, dinamika organisasi dipengaruhi oleh input, proses, dan output yang saling berinteraksi, termasuk aktor dan lingkungan pendukungnya.⁶¹

1. Faktor Pendukung

a. Dukungan Kepala Sekolah

Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner dan kolaboratif merupakan salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan pelaksanaan peran Wakil Kepala Sekolah bidang

⁶⁰ Michael Fullan, *Leading in a Culture of Change*, Jossey Bass (San Francisco, 2005).

⁶¹ Robbins and Coulter, *MANAGEMENT*.



Sarana dan Prasarana. Kepala sekolah yang mendukung akan memberikan ruang gerak, kepercayaan, serta dukungan kebijakan yang jelas untuk mengelola sarana dan prasarana secara optimal.

Dukungan ini mencakup pemberian otoritas dalam pengambilan keputusan pengadaan fasilitas, akses terhadap informasi perencanaan sekolah, dan fasilitasi dalam proses koordinasi lintas bidang. Dalam konteks ini, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin transformasional yang menginspirasi dan memberdayakan bawahannya untuk mencapai tujuan bersama.

Sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional dari Bass & Avolio, pemimpin yang mampu menginspirasi akan menciptakan suasana kerja yang produktif dan kolaboratif.⁶² Pemimpin seperti ini tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga membangun kepercayaan, motivasi, dan semangat inovasi dalam timnya.

b. Ketersediaan Anggaran yang Cukup

Tersedianya anggaran yang memadai menjadi landasan penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pengelolaan sarana dan prasarana. Kebutuhan seperti perawatan rutin, pengadaan peralatan baru, serta pembangunan dan renovasi fasilitas memerlukan dukungan finansial yang terencana.

Menurut teori manajemen sumber daya oleh Daft,

⁶² Bernard M. Bass Avolio and Bruce J., “Transformational Leadership And Organizational Culture,” *International Journal of Public Administration* 17 (1994): 541–554.



pengelolaan keuangan yang efektif mencerminkan efisiensi dan profesionalisme dalam organisasi pendidikan.⁶³ Ketika anggaran direncanakan dengan cermat dan dialokasikan secara adil, maka operasional sarana-prasarana dapat berjalan dengan lancar, mendukung proses pembelajaran secara menyeluruh.

c. Partisipasi Guru dan Tenaga Kependidikan

Kolaborasi antarpihak dalam lingkungan sekolah sangat menentukan keberhasilan program sarana dan prasarana. Guru dan tenaga kependidikan yang terlibat aktif dalam menjaga, merawat, serta memberikan masukan terhadap pengelolaan fasilitas, akan menciptakan sinergi dalam sistem pendidikan.

Prinsip ini sejalan dengan manajemen partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh Hoy & Miskel, bahwa pelibatan unsur organisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program mendorong terciptanya rasa memiliki, komitmen bersama, serta hasil yang lebih berkualitas.⁶⁴

d. Kemitraan dengan Lembaga Eksternal

Kerja sama dengan mitra luar seperti vendor, institusi pemerintah, sponsor, dan alumni, merupakan strategi penting untuk memperkuat kapasitas sekolah dalam pengelolaan fasilitas. Kemitraan ini dapat mendukung dalam bentuk hibah alat, bantuan

⁶³ Richard L. Daft, “Principles of Management Management : Challenges Management : A Competency,” in *South-Western* (Cengage Learning India Pvt. Limited., 2009), 68–79.

⁶⁴ Wayne K. Hoy and Cecil Miskel, “Educational Leadership and Reform,” in *Lap*, 2006, 259.



teknis, pelatihan, maupun pembangunan fasilitas.

Dalam teori sistem terbuka yang dikemukakan oleh Katz dan Kahn, organisasi pendidikan perlu membangun jejaring dan hubungan timbal balik dengan lingkungannya agar mampu beradaptasi dan berkembang.⁶⁵ Dengan terbukanya akses ke sumber daya eksternal, maka sekolah memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan fasilitas pendidikan.

2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Anggaran dan Kebutuhan Prioritas Lain

Kendala keuangan menjadi faktor yang sering dijumpai dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Meskipun peran Waka Sarpras didukung penuh oleh kepala sekolah, realisasi program sering kali terganggu oleh keterbatasan anggaran atau prioritas pembiayaan lainnya.

Robbins dan Coulter menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya, termasuk dana, merupakan tantangan utama dalam manajemen.⁶⁶ Oleh karena itu, peran Waka Sarpras juga mencakup kemampuan untuk membuat skala prioritas dan inovasi dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas.

b. Rendahnya Kesadaran Akan Pentingnya Sarana oleh Sebagian Warga Sekolah

Beberapa warga sekolah masih belum menunjukkan

⁶⁵ Daniel Katz and Robert L. Kahn, “Organizations and the System Concept,” *Classics of organization theory*, 80.480 (1978): 27.

⁶⁶ Robbins and Coulter, *MANAGEMENT*.



kepedulian yang cukup terhadap pentingnya menjaga dan menggunakan fasilitas dengan bijak. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dini, pemborosan, atau penggunaan yang tidak maksimal.

Menurut Fullan, perubahan perilaku dalam organisasi pendidikan memerlukan proses internalisasi nilai dan budaya sekolah.⁶⁷ Jika nilai tanggung jawab terhadap fasilitas belum tertanam kuat, maka pengelolaan sarana akan terhambat oleh perilaku yang kurang mendukung.

c. Lambatnya Proses Administrasi Pengadaan

Prosedur birokrasi yang kompleks, seperti pengajuan anggaran, pelelangan, hingga distribusi barang, seringkali memakan waktu lama. Hal ini berdampak pada keterlambatan pemenuhan kebutuhan fasilitas yang mendesak.

Griffin menyatakan bahwa kecepatan dan efisiensi dalam proses manajerial sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi.⁶⁸ Oleh karena itu, dibutuhkan penyederhanaan prosedur dan koordinasi yang baik antar unit untuk menghindari keterlambatan.

d. Ketergantungan pada Vendor Tertentu

Ketika sekolah bergantung pada satu vendor saja, maka segala hambatan yang dialami vendor tersebut baik dari segi pasokan, harga, maupun waktu pengiriman akan langsung berdampak pada

⁶⁷ Fullan, *Leading in a Culture of Change*.

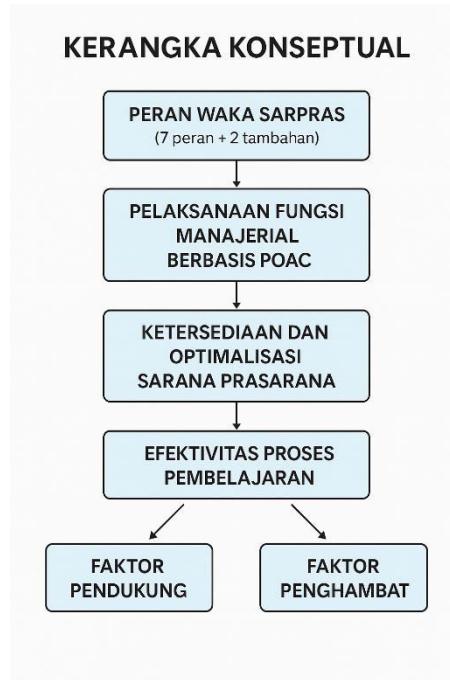
⁶⁸ A. Griffin, *Crisis, Issues and Reputation Management*, Kogan Page Publishers (Kogan Page Publishers, 2014), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI.

operasional sekolah.

Dalam teori risiko operasional menurut Hill & Jones, ketergantungan yang tinggi terhadap satu sumber eksternal dapat meningkatkan risiko kegagalan sistem.⁶⁹ Diversifikasi mitra kerja dan evaluasi berkala terhadap kinerja vendor menjadi penting untuk menghindari gangguan layanan.

Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor tersebut, Waka Sarpras dapat meningkatkan efektivitas perannya dalam mendukung proses pembelajaran. Identifikasi atas faktor pendukung memungkinkan optimalisasi kerja, sedangkan analisis terhadap faktor penghambat menjadi dasar perumusan strategi pengendalian dan perbaikan berkelanjutan.

E. Kerangka Konseptual



⁶⁹ CHARLES W. L. HILL and THOMAS M. JONES, "Stakeholder-Agency Theory," *Journal of Management Studie* 8, no. March (1992): 657–668.



Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun berdasarkan keterkaitan antara konsep-konsep utama yang menjadi fokus kajian, yaitu *peran Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana, proses pembelajaran, serta faktor pendukung dan penghambat*. Kerangka ini menggambarkan secara sistematis bagaimana variabel-variabel tersebut saling berkaitan dan membentuk alur logis dalam pelaksanaan peran manajerial di lingkungan sekolah.

1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana menjadi titik sentral dalam kerangka ini. Perannya dianalisis berdasarkan tujuh fungsi utama manajerial, yaitu sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pengkoordinasi, pengawas, evaluator, dan inovator. Dua peran tambahan yang muncul dari temuan lapangan, yakni sebagai *Koordinator Layanan Konsumsi Sekolah* dan *Koordinator Program Umroh*, turut memperkaya fungsi dan tanggung jawab strategis Waka Sarpras di sekolah.
2. Peran-peran tersebut berdampak langsung pada efektivitas proses pembelajaran, yang di dalamnya mencakup ketersediaan fasilitas belajar, kenyamanan ruang kelas, akses terhadap teknologi pembelajaran, dan efisiensi layanan pendukung lainnya.
3. Dalam pelaksanaan perannya, Waka Sarpras dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat, baik yang bersumber dari internal (komitmen pimpinan, kinerja staf, anggaran) maupun eksternal (dukungan yayasan, kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat).



Kerangka konseptual ini menjadi acuan dalam merumuskan fokus penelitian serta instrumen pengumpulan data. Hubungan antara peran Waka Sarpras, proses pembelajaran, serta faktor pendukung dan penghambat dianalisis secara kualitatif untuk memahami kontribusi nyata dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.